

ABSTRAK

Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang banyak diminati dalam pemenuhan modal masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang besar akan kendaraan bermotor menjadikan perusahaan pembiayaan sebagai alternatif untuk mendapatkan kendaraan bermotor. Namun, hal itu tidak terlepas akan keberadaan *leasing* yang melakukan pelanggaran hukum terhadap debitor atas penarikan paksa objek jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor yang dijadikan objek jaminan oleh konsumen. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum debitor atas penarikan paksa objek jaminan fidusia dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021, perlindungan hukum debitor dan kreditor menjadi jelas dan tegas kemudian diakomodir, serta berdampak pada saat terjadinya wanprestasi pada perjanjian pokok, kreditor dapat melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia dengan syarat adanya kesepakatan atau penyerahan sukarela oleh debitor. Apabila debitor tidak melakukan hal tersebut maka kreditor hanya bisa melakukan eksekusi dengan sepengetahuan pengadilan dan perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Penarikan Paksa, Wanprestasi

ABSTRACT

Leasing is a financing institution that is in great demand in fulfilling company capital. The large public need for motorized vehicles makes finance companies an alternative to obtaining motorized vehicles. However, this cannot be separated from the existence of leasing which violates the law against debtors for the forced withdrawal of fiduciary collateral objects such as motorized vehicles which are used as collateral objects by consumers. The problems examined in writing this law are the debtor's legal protection for the forced withdrawal of fiduciary collateral objects and the impact of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021. This study uses an empirical juridical approach, research specifications use an empirical juridical method, and data collection methods use interview techniques. The collected data was then analyzed through a qualitative descriptive analysis. The results of this study show that after the decisions of the Constitutional Court Numbers 18/PUU-XVII/2019 and 2/PUU-XIX/2021, the legal protection of debtors and creditors becomes clear and firm and then accommodated, and has an impact on defaults in the principal agreement, creditors can carry out executions on fiduciary collateral objects on condition that there is an agreement or voluntary submission by the debtor. If the debtor does not do this, then the creditor can only carry out the execution with the knowledge of the court and legal protection for the debtor for withdrawing the object of fiduciary guarantees after the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the Constitutional Court's decision Number 2/PUU-XIX/2021 have been regulated legally preventive or repressive.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Legal Protection, Forced Withdrawal, Default*